TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENJUALAN HEWAN YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstrak

Pandu Budianto

Perkembangan pembangunan dewasa ini yang berkelanjutan harus didukung oleh semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia Teknologi informasi di Indonesia yang semakin canggih saat ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi sangat pesat dewasa ini telah mempengaruhi kehidupan perekonomian secara global khususnya di Indonesia dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Di samping aspek positif, perkembangan teknologi dapat pula berdampak negatif terhadap kehidupan manusia termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistim khususnya marga satwa yang dilindungi oleh pemerintah.. Internet telah menjadi faktor dominan yang secara keseluruhan mempengaruhi besarnya perdagangan hewan-hewan langka yang dilindungi, berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji permasalahan mengenai bagaimana Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengatur tentang penjualan hewan langka yang dilindungi melalui internet, serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap para pihak terkait dengan penyelenggaraan penjualan hewan yang dilindungi melalui internet menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Internet telah menjadi faktor dominan yang secara keseluruhan mempengaruhi besarnya perdagangan hewan-hewan langka yang dilindungi, dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik dapat dilakukan tanpa adanya halangan jarak. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat Pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap para pihak terkait dalam penjualan hewan melalui internet terdiri dari 3 pendekatan yaitu pendekatan teknologi,pendekatan sosial budaya,pendekan hukum. Tindakan represif/tindakan hukum yang dilakukan polisi atua penyidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini menerapkan Pasal 40 (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).